

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Format pengaturan politik lokal di Indonesia, khususnya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintah Daerah telah ada semenjak dirumuskannya UUD 1945, namun hasil studi empirik dan pendapat banyak kalangan mengatakan bahwa sebelum era transisi menuju demokrasi (sebelum UU Nomor 2 Tahun 1999), khususnya selama masa Orde Baru, Pemerintah Daerah lebih menampakkan diri sebagai subordinasi dari Pemerintah Pusat, ia bukan representasi Daerah secara substantif tetapi lebih merupakan representasi Pusat. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan seperti ini menghendaki adanya petunjuk dan pertanggung jawaban langsung kepada Pemerintah Pusat, bukan kepada masyarakat daerah.

Kebijakan otonomi daerah sebagai buah dari penerapan prinsip desentralisasi yang sebagai format pengaturannya terumus di dalam UU Nomor 2 Tahun 1999, telah membuka tabir penyelenggaraan pemerintah pada tingkat lokal yang selama ini dinilai cenderung tertutup, tidak demokratis, masyarakat selalu dipinggirkan dari perumusan dan pengambilan kebijakan, bahwa masyarakat tidak memiliki peluang untuk mengakses berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat dibatasi secara perorangan tetapi harus secara bersama-sama begitu juga penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.

Dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Negara memberikan perlindungan kepada anak jalanan yang tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Kemudian Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan keatakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perlindungan hukum untuk anak juga tertuang dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu; (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20). (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakannya melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan prperlindungan anak (Pasal 25). (3) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga (Pasal 55) Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak agar tetap hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan, anak jalanan

merupakan bagian dari warga Negara Indonesia maka anak jalanan punya hak yang sama sebagai warga Negara untuk mendapat perlindungan, karena keberadaan anak jalanan bukan karena keinginannya tetapi disebabkan oleh kondisi baik dari segi ekonomi, keluarga maupun lingkungannya. Hak anak jalanan untuk memperoleh perlindungan yang sama dengan anak-anak lainnya mendapat hak atas pendidikan dan kesejahteraan untuk hidup layak sebagai warga Negara.

Menurut Ramli (2000:15) menyatakan bahwa perlindungan anak jalanan merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karenanya merupakan kewajiban bagi pemerintah dan setiap anggota masyarakat mengusahakan perlindungan sesuai kemampuannya untuk kepentingan bersama dan nasional. Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita katakan bahwa kegiatan perlindungan anak jalanan merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan hukum anak jalanan tersebut yang dapat diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak jalanan.

Bila sampai saat ini anak belum menjadi prioritas pembangunan, patut dimaklumi, karena masalah-masalah sosial yang besar pun masih banyak yang belum diperhatikan. Lagipula masalah-masalah sosial seringkali menjadi urusan kedua setelah masalah-masalah ekonomi usai. Dalam persoalan-persoalan sosial ini seringkali kiprah pemerintah sudah terlambat. Seperti masalah anak jalanan, sementara anak-anak sudah dan tengah memperoleh banyak ancaman yang membahayakan hidupnya, Departemen Sosial baru berkeputusan tentang pendataan dan definisi anak jalanan. Beruntung masih ada dukungan dari masyarakat yang sangat besar, baik melalui partisipasi langsung dalam berbagai kegiatan maupun secara formal melalui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan dukungan ini setidaknya masalah yang terlanjur muncul dapat segera diatasi, karena bila masalah yang muncul tersebut penanganannya ditunda dan

dibiarkan menjadi besar, maka dalam sesaat bisa menghancurkan semua tatanan yang telah dibentuk dengan baik.

Sampai saat ini suatu kebijakan khusus untuk anak jalanan dan pekerja anak sudah sangat mendesak untuk dibuat, namun belum juga dikeluarkan. Padahal kebijakan ini dapat menjadi dasar pijakan bagi kesamaan tindakan, utamanya bagi kepentingan masyarakat (LSM) dalam upayanya melakukan berbagai kegiatan terhadap anak jalanan maupun pekerja anak. Belum adanya kebijakan khusus ini akhirnya membuat LSM terkesan bekerja sendiri-sendiri. Hingga akhirnya LSM selalu hati-hati dalam melakukan pekerjaannya, sebagai akibat tidak dipunyainya cantolan konstitusi. Apalagi dalam budaya politik kita yang bila tidak ada referensi konstitusinya, sering dicap sebagai kelompok luar dari kepentingan pemerintah. Tampaknya kebijakan yang lambat muncul ini adalah karena masalah dana yang tidak siap ditanggung oleh pemerintah, kebijakan baru ini adalah masalah implikasi dana, hal ini mengingat setiap kebijakan harus diimplementasikan ke dalam sebuah program yang sudah barang tentu memerlukan banyak dana untuk mewujudkannya. Ini tentu akan menguras anggaran pemerintah, apalagi untuk masalah seperti anak jalanan yang terhitung masih baru. Sementara masalah anak-anak terlantar lainnya belum juga disentuh secara efektif. Pada kebijakan yang ada sampai saat ini, biasanya setelah diwujudkan dalam institusi dan berbagai program seringkali tidak memenuhi harapan. Banyak institusi yang belum berfungsi secara fleksibel, tetapi sudah diklaim bahwa masalah yang dihadapi sudah ditangani. Untuk itu berbagai institusi harus terus mengembangkan fungsinya secara fleksibel, karena masalah ini sangat cepat berkembang dan berjalan seiring dengan kemajuan modernisasi yang begitu cepat memasuki kehidupan masyarakat. Apalagi dalam strategi pembangunan sumber daya manusia di PJP II ini anak tampaknya belum mendapat perhatian utama, padahal manusia yang unggul dan berkualitas tidak terbentuk begitu

saja. Namun harus disiapkan sejak dini, sejak anak-anak, sejak balita, bahkan sejak dalam kandungan. Jadi jangan harap memperoleh SDM yang baik jika pertumbuhan dan perkembangan masa anak-anak tidak mulus. Selain itu bila berbicara tentang anak haruslah secara keseluruhan, meliputi pula aspek anak-anak bermasalah. Bukan hanya memoles anak-anak yang memang sudah unggul, tetapi juga disertakan anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya.

Menurut Tata Sudrajat (1996), salah satu kunci yang dapat mengungkapkan permasalahan di atas adalah karena tidak adanya *political will* yang kuat dari pemerintah. Suatu *political will* harus gencar dan diikuti pula oleh suatu tindakan untuk mengatasi anak-anak bermasalah ini. Lihat contohnya dalam kasus penahanan anak yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Merebaknya kasus ini ternyata tidak juga menggoyahkan para pengambil keputusan untuk menggolkan UU peradilan anak yang sudah berahun-tahun terkatung-katung.

Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan untuk mengatasi masalah anak yang sampai saat ini belum terkoordinasi dengan baik. Urusan anak dibagi dalam beberapa departemen, yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesehatan yang kemudian pada tingkat Menko Kesra dibentuk kelompok kerja. Kalau pemerintah bisa membentuk BKKBN atau DNIKS, mengapa tidak dapat dibentuk Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Anak? Atau lembaga sejenis yang mempunyai *level* tidak jauh dari departemen. Jika saja pengelolaan urusan anak diadakan dalam satu naungan, tentu akan lebih mengefektifkan pekerjaan dan pencapaian tujuan daripada dibagi-bagi seperti sekarang ini yang memerlukan banyak waktu dan tenaga. Meski kegiatan kesejahteraan anak merupakan bagian usaha kesejahteraan sosial, tetapi yang patut diingat adalah kegiatan ini tidak dapat dipandang sebagai kegiatan konsumtif yang hanya

menghabiskan uang. Akan lebih baik mengeluarkan rupiah untuk mengatasi 10 anak nakal ketimbang membiarkan sepuluh anak tersebut tetap nakal dan menjadi penjahat di kemudian hari. Kerugian yang lebih besar akan diderita negara dan masyarakat di masa datang jika tidak dilakukan satu tindakan untuk merubah mereka dari awal. Pengeluaran biaya untuk penanganan anak-anak bermasalah bisa jadi merupakan investasi yang bermanfaat besar di masa datang. Dengan kata lain masalah anak ternyata tidak berdiri sendiri, mereka sebenarnya merupakan akibat dari berbagai masalah makro seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, kurangnya kebijakan, *stress* dalam keluarga dan tuntutan produksi. Sebagai korban dari masalah yang besar, mereka sebagai anak jalanan dan pekerja anak dalam kesehariannya menghadapi juga masalah-masalah yang cukup rumit.

Pendidikan merupakan hak juga kewajiban manusia *sebagai* hakikatnya. Setiap manusia merupakan warga negara yang pantas memperoleh kualitas pendidikan yang terbaik. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menyadari hal itu. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 diutarakan bahwa “Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Pendidikan nasional (pendidikan formal), dapat membantu masyarakat untuk terus bertahan demi kelangsungan hidupnya menuju kesejahteraan yang ingin diraihnya. Dengan kata lain pendidikan formal ditujukan menjadi salah satu tombak untuk menghadapi berbagai macam dinamika hidup.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1998 tentang sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional merupakan alat dan sekaligus tujuan yang sangat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita nasional. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan peran dan fungsi pendidikan nasional dalam pelaksanaan pembangunan

bangsa. Pendidikan nasional merupakan alat yang sangat fungsional dalam upaya pembentukan manusia Pancasila sebagai dasar pembangunan manusia yang berkualitas dan mampu mandiri serta dalam rangka pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, faham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (Penjelasan Umum UU No. 2 / 1998). Dengan kata lain pendidikan nasional berfungsi sebagai alat utama untuk mengembangkan kemampuan serta peningkatan mutu kehidupan dan martabat bangsa.

Menurut ahli sosiologi pendidikan terdapat relasi resiprokal (timbang balik) antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya didalam kehidupan masyarakat yang kompleks.

Demikian juga sebaliknya kondisi masyarakat, baik dalam aspek kemajuan peradaban dan sejenisnya, tercermin dalam kondisi dunia pendidikannya. Oleh karena itu majunya dunia pendidikan dapat menjadi cerminan majunya masyarakat dan dunia pendidikan yang kacau juga dapat menjadi cerminan terhadap kondisi masyarakat yang juga penuh persoalan. Para ahli antropologi pendidikan seperti Theodore Brameld melihat keterkaitan yang sangat erat antara pendidikan, masyarakat dan kebudayaan. (Tilaar, 1999:7).

Masyarakat sebagaimana dikatakan Ary H. Gunawan, memiliki fungsi sebagai penerus budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya, (Naim Ngainum dkk, 2008:13). Proses ini berlangsung secara dinamis, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Media untuk alih budaya ini adalah pendidikan dan interaksi sosial. Dalam kerangka ini

pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, ketimpangan dalam aspeknya justru akan memunculkan kekerasan, konflik, dan keterbelakangan. Pendidikan dalam masyarakat adalah proses pendidikan yang mengakui akan hak-hak dan kewajiban perorangan dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang demokratis, hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan batu landasan dari masyarakat. Masyarakat demokratis hanya ada apabila hak-hak dan kewajiban warga negaranya diakui, dikembangkan dan dihormati. Dunia pendidikan memang dunia yang tidak pernah selesai untuk diperbincangkan, karena selama manusia ada persoalan tentang pendidikan akan tetap diperbincangkan di dunia. Nafas manusia adalah nafas pendidikan, sehingga mustahil manusia hidup tanpa pendidikan didalamnya. Karena itu ada tanggung jawab untuk mengetengahkan apa dan bagaimana pendidikan sebenarnya sehingga semua lapisan masyarakat dari lapisan ekonomi manapun dapat menikmati pendidikan dengan harapan ingin mewujudkan sebuah kehidupan yang harmonis, damai, selaras dan berperadaban dengan mengedepankan semangat saling bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan ketidakadilan.

Anak jalanan adalah bagian dari masyarakat kita sekarang ini dan merupakan masalah sosial yang perlu ditangani. Anak jalanan kategori anak marjinal, sebagian besar anak jalanan adalah pekerja anak informal karena mereka sebenarnya bekerja dijalanan. Mereka dalam kehidupannya, mayoritas tidak mau diatur dan hidup yang penuh dengan kebebasan. Sehingga banyak yang menggelandang dan kehidupannya dihabiskan di jalanan daripada di rumah.

Defisini anak jalanan itu sendiri, merujuk pada konsep yang dibuat oleh UNICEF (1990) adalah :

*Street children are those who have abandoned their homes, schools and immediate communities before they are sixteen years of age and have drifted into a nomadic street life (Childhope, 1990).*

(anak jalanan adalah mereka yang sudah melepaskan diri dari rumah, sekolah dan lingkungannya sebelum berusia enam belas tahun dan terperosok pada kehidupan jalanan yang berpindah-pindah)

Anak jalanan seringkali dianggap sebagai “sampah masyarakat” karena masyarakat seringkali merasa terganggu oleh kehadiran mereka yang lalu lalang di perempatan jalan raya, di pinggir jalan, di sekitar gedung perkantoran, pertokoan, dan banyak tempat-tempat lain yang seringkali di jadikan tempat mangkal anak jalanan bahkan pada jam-jam dimana seharusnya yang seusia mereka bersekolah.

Karena sebagian atau seluruh waktu anak jalanan dihabiskan di jalan, mereka rentan terhadap kejahatan baik berupa kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Kekerasan yang terjadi pada mereka dan segala bentuk eksploitasi harus mereka hadapi disamping mereka harus mencari makan, mereka juga harus melindungi diri dari ancaman yang ada di jalanan. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik yang berupa pemukulan, penganiayaan, menampar, meludahi dan sebagainya, kekerasan mental yang berupa celaan, menghina, menakuti, mengancam, berkata kasar dan sebagainya, dan kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual (perkosaan), pelecehan seksual dan sebagainya.

Anak jalanan muncul karena ketimpangan struktur penduduk, dimana usia muda jumlahnya banyak, sedangkan tingkat kesejahteraan mereka masih minim sekali. Juga, kehadiran anak jalanan tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya, pendidikan, dan psikologis (Abraham

Fanggidae, 1993). Selain itu, menurut Odi Solahudin (2000) ada beberapa faktor yang menyebabkan anak pergi ke jalanan berdasar alasan dan penuturan anak, antara lain :

- a) Kekerasan dalam keluarga
- b) Dorongan keluarga
- c) Impian kebebasan
- d) Ingin memiliki uang sendiri, dan
- e) Pengaruh teman

Bagi kaum muda tersebut jalanan juga menjadi arena untuk menciptakan suatu organisasi sosial, akumulasi pengetahuan dan rumusan strategi untuk kebebasan untuk keberadaan eksistensinya. Artinya, dia juga berupaya melakukan penghindaran atau melawan pengontrolan dari pihak lain.

Melihat keberadaan anak jalanan tersebut, terdapat pengertian tentang aktivitas ekonomi, sehingga menimbulkan pemahaman tentang pekerja anak. Anak jalanan memang melakukan pekerjaan informal seperti menyemir sepatu, mengamen, menjadi penjual koran, pedagang asongan, dan sebagainya. Soedijar (1989) dan Sanusi (1996) menyatakan bahwa keterlibatan dalam aktifitas ekonomi guna membantu keluarga, telah menempatkan anak-anak tersebut dalam resiko bahwa mereka dipaksa untuk mempertahankan jumlah pendapatannya dan akhirnya meninggalkan sekolah. Hasil wawancara dengan anak jalanan di Jakarta mengungkapkan bahwa mereka merasa bangga dan berarti ketika mereka dapat mencari nafkah untuk membantu keluarga. Banyak anak, akhirnya tidak berminat sekolah dan ingin mencari nafkah lebih banyak untuk keluarganya (Irwanto, Muhammad Farid & Jeffry Anwar, 1999).

Anak jalanan, seperti halnya anak-anak lainnya memiliki hak-hak dan kewajiban untuk mengenyam pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, pasal 9, ayat 1, yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Salah satu organisasi sosial yang turut berperan dalam penanganan permasalahan anak jalanan adalah Rumah Singgah Mandiri yang berlokasi di jalan Perintis Kemerdekaan, No 33B Kerebokan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. Keberadaan Rumah Singgah Mandiri yang berfungsi memberikan pembinaan kepada anak jalanan, sebagai tempat untuk memperluas akses pendidikan, mengentaskan anak dari jalanan serta memupuk kepribadian yang mandiri. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mencari tahu seberapa pentingkah pendidikan formal menurut anak jalanan yang berada di Rumah Singgah Anak Mandiri tersebut.

Berdirinya Rumah Singgah Anak Mandiri sendiri diinisiasi oleh Departemen Sosial ( DEPSOS) dan UNDP untuk mengelola dan memberdayakan anak jalanan di Yogyakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi kerja pemerintah terhadap pemberdayaan anak jalanan melalui Rumah Singgah Anak Mandiri ( RSAM ) terlebih terhadap persepsi anak jalanan tentang pentingnya pendidikan formal yang diselenggarakan negara.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana persepsi anak jalanan mengenai pentingnya pendidikan formal?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan melihat rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi anak jalanan mengenai signifikansi kegiatan pendidikan

formal di sekolah di bandingkan dengan aktifitas mereka di jalanan (yang bermotifkan ekonomi). Dalam hal ini mana yang menurut mereka lebih penting dari keduanya.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu, kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan kajian mengenai permasalahan sosial khususnya yang berhubungan dengan keberadaan anak jalanan khususnya di Yogyakarta.

##### 2. Praktis

###### 2.1. Masyarakat

Menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mengetahui sumber permasalahan anak jalanan terhadap pendidikan dan merubah stigma negatif masyarakat terhadap anak jalanan.

###### 2.2. Pemerintah

Menjadi referensi pemerintah dalam menangani permasalahan anak jalanan di Yogyakarta dan merumuskan kebijakan untuk menganganinnya.

Dapat membantu pekerja sosial, khususnya bagi para pekerja sosial yang menyediakan pelayanan yang berhubungan dengan pendidikan anak jalanan.

## **E. KERANGKA TEORI**

Kerangka teori adalah bagian yang terdiri dari uraian-uraian terkait teori yang ada di dalam penelitian. Dalam penelitian, teori digunakan untuk mendukung dan memecahkan masalah yang muncul. Menurut Marx dan Goodson, menyatakan bahwa teori ialah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung (Marx dan Goodson, 1976). Snelbecker (1974) menyatakan ada empat fungsi suatu teori, yaitu :

1. Mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian,
2. Menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban,
3. Membuat ramalan atas dasar penemuan,
4. Menyajikan penjelasan, dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan *mengapa*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa teori merupakan penjelasan mengenai perihal yang terjadi di masyarakat yang menjadi sebuah gambaran dasar untuk mengetahui sebuah peristiwa dan mencari kesimpulan secara sistematis.

Kedudukan teori adalah sebagai landasan untuk mengkaji permasalahan yang timbul. Teori yang jelas akan mempermudah menemukan solusi atas setiap permasalahan. Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang digunakan untuk memudahkan suatu penelitian mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan, yaitu :

## 1. Persepsi

Menurut Batuadji dkk (2009), persepsi adalah suatu proses yang terintegrasi dalam diri individu terhadap objek yang dipersepsikan, sehingga menimbulkan kesan. Dalam proses tersebut terjadi pengumpulan, pengorganisasian, interpretasi/penafsiran, dan pemaknaan terhadap stimulus-stimulus yang ada. Kesan yang timbul dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam individu yang mempersepsikan, faktor-faktor yang berasal dari stimulus yang dipersepsi, dan lingkungan sosial.

Jalaludin Rakhmat (2007) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan menurut Suharnan (2005), persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia. Menurut ada tiga aspek di dalam persepsi yang relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Walgito (2003) mengemukakan bahwa persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Individu dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang diterima dan alat indera dipergunakan sebagai penghubung antara individu dengan dunia luar. Agar proses pengamatan itu terjadi, maka diperlukan objek yang diamati alat indera yang cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan pengamatan. Persepsi dalam arti

umum adalah pandangan seseorang terhadap suatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak.

Selain faktor internal yang ada di dalam diri individu yang akan mempengaruhi dalam individu, faktor eksternal berupa stimulus dan lingkungan juga ikut berpengaruh dalam proses persepsi. Agar stimulus dapat dipersepsi, maka stimulus harus cukup kuat, stimulus harus melampaui ambang stimulus, yaitu kekuatan stimulus yang minimal tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran, sudah dapat dipersepsikan individu (Walgito, 2003).

Persepsi berkaitan dengan lingkungan, yaitu sebagai proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan tangkapan indera mereka agar kemudian dapat memberi makna kepada lingkungan mereka. Lingkungan menjadi faktor utama penentu bagaimana persepsi yang diciptakan oleh seseorang tersebut. Informasi yang diperoleh dari berbagai indera mereka akan menjadi bahan pembentuk persepsi. Sehingga, apabila dari lingkungan terdapat dorongan yang kuat terhadap penerimaan indera seseorang, maka persepsi yang terbentuk akan sama seperti tanggapan orang-orang di sekitarnya (Robbins, 2003)

## 2. Pendidikan

Dewasa ini para ahli pendidikan memberikan pengertian pendidikan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Keragaman pengertian ini merupakan hal yang wajar karena antara satu orang ahli dengan ahli yang lain memiliki berbagai perbedaan, terutama perbedaan latar belakang; baik latar belakang sosial, pendidikan, budaya, agama, ataupun latar belakang lainnya. Menurut Gunawan (2000) pendidikan adalah suatu interaksi manusiawi (*human interaction*) antara pendidik/guru dengan anak didik/subjek didik/peserta didik/siswa yang dapat menunjang pengembangan manusia seutuhnya yang berorientasikan pada nilai-nilai dan

pelestarian serta pengembangan kebudayaan yang berhubungan dengan usaha-usaha pengembangan manusia tersebut.

Darmaningtyas (1999) pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Titik tekan dari pengertian diatas terletak pada “usaha sadar dan sistematis”. Dengan demikian tidak semua usaha memberikan bekal pengetahuan kepada anak didik dapat disebut pendidikan jika tidak memenuhi kriteria yang dilakukan secara sadar dan sistematis.

Sementara ahli antropologi Indonesia Koentjaraningrat memberikan pengertian pendidikan sebagai usaha untuk mengalihkan adat istiadat dan seluruh kebudayaan dari generasi lama ke generasi baru, Said, M (1989). Pengertian yang dibuat Koentjaraningrat ini sarat dengan nuansa budaya, karena dia ahli antropologi.

Pengertian dengan nuansa filosofis terlihat pada rumusan Sudarminta J, yang mangartikan pendidikan secara luas dan umum sebagai usaha sadar yang dilakukan pendidik melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk membantu anak didik mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi yang dewasa-susila. Kata pendidikan sekurang-kurangnya mengandung empat pengertian: yaitu sebagai kegiatan, proses, buah, atau produk yang dihasilkan oleh proses tersebut, dan sebagai ilmu (Darminingtyas, 1999).

Pengertian yang serupa den gan Sudarminta J, seorang pakar filsafat pendidikan Indonesia, Drijarkara N (1980) juga memberikan pengertian pendidikan adalah suatu perbuatan fundamental dalam bentuk komunikasi antar pribadi, dan dalam komunikasi tersebut terjadi proses pemanusiaan manusia muda, dalam arti terjadi proses hominisasi (proses menjadikan seseorang sebagai manusia), dan humanisasi (proses pengembangan kemanusiaan manusia).

Dengan demikian pendidikan harus membantu orang agar tahu atau mau bertindak sebagai manusia.

Sementara Drijarkara (1980) merumuskan hakekat pendidikan sebagai usaha orangtua bagi anak-anaknya dengan maksud untuk menyokong kemajuan hidupnya dalam arti memperbaiki tumbuhnya kekuatan ruhani dan jasmani yang ada pada anak-anak.

Persektif berbeda diberikan oleh tokoh pendidikan asal Brazil, Paulo Freire mengartikan pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang permanen yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, dan melalui praktis mengubah keadaan itu. Tahap kedua di atas tahap pertama, dan merupakan sebuah proses tindakan cultural yang membebaskan (Denis Collins, 1999).

## **2.1 TUJUAN PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi pembentukan karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapatkan kemajuannya sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang kurang bahkan tidak beradab karena itu sebuah peradaban yang memberdayakan akan lahir dari suatu pola pendidikan dalam skala luas yang tepat guna dan efektif bagi konteks dan mampu menjawab segala tantangan zaman.

Sejalan dengan uraian diatas tentang manfaat pendidikan dapat melihat pendapat filsuf Yunani Plato (428-347), manfaat pendidikan membuat orang menjadi baik dan orang baik tentu berperilaku mulia. Jadi dengan pendidikan ada harapan yang ingin diwujudkan adalah sebuah kehidupan yang harmonis, damai, selaras, dan ber peradaban dengan mengedepankan semangat

saling bekerja sama dan mengutamakan kebenaran dan kebaikan serta menjauhi segala bentuk kerusakan yang sangat membahayakan bagi eksistensi kemanusiaan manusia itu sendiri.

Manfaat manusia diatas dikemukakan oleh pakar pendidikan Yunani namun sebagai bangsa yang berbudaya kita juga memiliki pakar-pakar pendidikan pada zaman pergerakan nasional seperti : Ki Hajar Dewantara, Hasyim Asy'ari, dan Ahmad Dahlan.

Menurut Ki Hajar Dewantara ada dua hal yang penting dalam persoalan pendidikan yang perlu dipahami maknanya antara sistem “pengajaran” dan “pendidikan”. Menurutnya pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah (kemiskinan dan kebodohan). Sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup bathiniah (otonomi berpikir mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik). Manusia yang merdeka itu adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi ia mampu bersandar dan berdiri diatas kakinya sendiri. Artinya sistem pendidikan itu mampu menjadikan setiap individu hidup mandiri dan berani beropikir sendiri atau memakai istilah Kant, *sepere aude*. Dalam arti luas maksud pendidikan dan pengajaran adalah bagaimana memerdekakan manusia sebagai anggota dari sebuah persatuan (rakyat). Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang bersifat dewasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai hidup bersama. Oleh karena itu, setiap orang merdeka harus memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana dia hidup. Dalam hal ini harus meyakini bahwa setiap individu juga memiliki hak yang sama seperti dirinya yang juga berhak menuntut kemerdekaannya.

Sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebenarnya bersifat mengasuh, melindungi, dan meneladani atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah Ing Ngarso Sun Thulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Maka untuk dapat mencapai ini perlu ketetapan pikiran dan batin yang akan menentukan kualitas seseorang sehingga rasa

mantap tadi dapat tercapai. Sifat umum pendidikan yang dicanangkan adalah segala daya-upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak.

Dalam pengertian taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu, agar kita memajukan kesempurnaannya. Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kata pendidikan jauh lebih luas dari pada pengajaran. Pendidikan mencakup manusia seutuhnya, baik itu pendidikan intelektual, moralitas (nilai-nilai) dan budi pekerti. Pendidikan menurut faham ini adalah pendidikan yang beralaskan garis-garis dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan negara lain demi kemuliaan segenap manusia seluruh dunia. Kiranya ini sejalan dengan pendapat Aristoteles tentang pendidikan yaitu segala usaha dan upaya untuk memanusiawikan manusia, mengangkat harkat manusia agar semakin beradab dan berpengetahuan. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan sesungguhnya adalah menyangkut jiwa dan raga setiap individu untuk semakin dewasa dan mandiri. Pendidikan disini termasuk lahir dan batin. Serta pendidikan harus melibatkan pertimbangan kemanusiaan dan selaras dengan nilai-nilai hakiki yang ada dalam diri setiap peserta didik karena dalam pendidikan tujuannya adalah penguasaan diri sebab disinilah pendidikan memanusiawikan manusia atau menjadikan manusia/peserta didik kian beradab dan memiliki keadaban (humanisasi). Penguasaan diri merupakan langkah yang harus dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiawikan manusia. ketika setiap peserta didik mampu menguasai dirinya mereka akan mampu juga menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Menurut Ki Hajar Deawantara pengetahuan, kepandaian, janganlah dianggap sebagai maksud dan tujuan tetapi ia merupakan alat, perkakas, lain tidak. Bunganya yang kelak menjadi

buah, itulah yang baru diutamakan. Buahnya pendidikan yaitu matangnya jiwa yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang tertib dan suci, serta bermanfaat bagi orang lain.

Eksentiasi yang diletakkan Ki Hajar Dewantara pada kematangan jiwa menunjukkan secara pasti titik pusat penghampiran dari setumpuk usaha pendidikan, khususnya sekolah. Didalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, eksentuansi ini dapat dirumuskan sebagai bagian dari statemen kebangsaan yang teramat penting, yaitu kemerdekaan, sebagaimana secara menarik dirumuskan *the founding father* dalam mukadimah UUD 1945: “kemedekaan adalah hak segala bangsa”. (Tuheleley S, 2005). Pendidikan yang humanis menurut Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (psikomotorik). Singkatnya, “*educate the head, the heart, and the hand*”. Dengan menggunakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, asuh (*care and dedication based on love*). (Ki Hajar Dewantara, 1962).

Hasyim Asy’ari sebagai pendiri Nahdatul Ulama, dimana perjuangannya menjadi titik tolak kebangkitan Umat Islam Indonesia. Dizaman yang sangat patriarki, Hasyim Asy’ari begitu sangat menghargai perempuan. Beliau tidak sepakat dengan opini masyarakat awam Jawa yang mengatakan bahwa wanita sekedar konco wingking dan tidak memerlukan pendidikan. Bagi Hasyim Asy’ari sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa pendidikan itu wajib hukumnya baik bagi laki-laki dan perempuan muslim. Hal ini dinyatakan dalam forum pada mukhtamar NU dan menjadi landasan berdirinya pondok pesantren yang khususnya di dirikan untuk anak remaja puteri. Pembahasan pendidikan menurut Hasyim Asy’ari menekankan pada masalah etika namun

tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Pemikirannya dalam masalah pendidikan adalah : Signifikansi Pendidikan.

Hasyim Asy'ari menyebutkan tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu, yaitu : pertama, bagi murid hendaknya berniat suci dalam menuntut ilmu, jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan melecehkannya atau menyepelkannya. Kedua, bagi guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu, tidak mengharapkan materi semata. Nampaknya pemikiran Hasyim Asy'ari tentang hal tersebut diatas dipengaruhi oleh pandangannya akan masalah sufisme (tasawuf), yaitu salah satu persyaratan bagi siapa saja yang mengikuti jalan sufi menurutnya adalah “niat yang baik dan lurus”.

Belajar menurut Hasyim Asy'ari merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam bukan hanya sekedar untuk menghilangkan kebodohan. Pendidikan hendaknya mampu mengantarkan umat manusia menuju kemasyalahatan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan hendaknya mampu mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai kebajikan dan norma-norma Islam kepada generasi penerus umat dan penerus bangsa. Umat Islam harus maju dan jangan mau dibodohi oleh orang lain, umat Islam harus berjalan sesuai dengan nilai dan norma-norma Islam, seperti : etika yang harus diperhatikan murid dalam belajar, etika seorang murid kepada guru, etika seorang murid terhadap pelajaran, etika seorang guru dalam mengajar, etika seorang guru bersama murid dan etika terhadap buku, alat pelajaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

Dalam hal ini terlihat, bahwa Hasyim Asy'ari lebih menekankan kepada pendidikan ruhani atau pendidikan jiwa, namun demikian pendidikan jasmani tetap diperhatikan, khususnya bagaimana mengatur pola makan, minum, tidur dan sebagainya seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW. Perbanyak waktu untuk belajar dan menuntut ilmu pengetahuan, isi hari-hari dan waktu yang ada dengan hal-hal yang bermanfaat. Terlihat bahwa apa yang ditawarkan Hasyim Asy'ari lebih bersifat pragmatis, artinya apa yang ditawarkan berangkat dari praktek yang selama ini dialaminya. Inilah yang memberikan nilai tambah dalam konsep yang dikemukakannya. Terlihat juga betapa Hasyim Asy'ari sangat memperhatikan sikap serta penampilan seorang guru baik segi pakaian, keramah tamahannya untuk diteladani.

Demikian sebagaimana dari pemikiran mengenai pendidikan yang dikemukakan Hasyim Asy'ari sejalan dengan apa yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Imam Ghazali, misalnya saja seperti apa yang dikemukakan oleh Hasyim Asy'ari bahwa tujuan utama pendidikan itu adalah mengamalkannya, dengan maksud agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Imam Ghazali juga mengemukakan bahwa pendidikan pada prosesnya haruslah mengacu kepada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insane. Oleh karena itu tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah "tercapainya kemampuan insane yang bermuara pada pendekatan diri pada Allah, dan kesempurnaan insane yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat".

Begitu juga pemikiran Hasyim Asy'ari mengenai niat orang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu, yaitu hendaknya meluruskan niatnya lebih dahulu, tidak mengharapkan hal-hal duniawi semata tapi harus niat ibadah hanya untuk mencari ridha Allah. Demikian juga dengan Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahwa tujuan murid menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah dan mensucikan batinnya serta memperindah dengan sifat-sifat

yang utama dan janganlah menjadikan ilmu sebagai alat untuk mengumpulkan harta kekayaan atau mendapatkan kelezatan hidup dan lain sebagainya. Mengenai etika seorang murid yang dikemukakan Hasyim Asy'ari sejalan dengan pendapat Al-Ghazali yang mengatakan "hendaknya murid mendahulukan kesucian batin dan kerendahan budi dari sifat-sifat tercela seperti : marah, hawa nafsu, dengki, busuk hati, takabur, ujud, dan sebagainya. (Wahyuningto L, 2007)

## **2.2. MAKNA PENDIDIKAN**

### **2.2.1 Aspek Budaya**

Ditinjau dari aspek budaya, pendidikan merupakan sarana transformasi budaya dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam transformasi budaya tersebut prosesnya yakni melalui pendidikan yang lebih ditekankan adalah faktor rasio dan wawasan dengan menghindari kegiatan adaptasi secara pasif, kodrati serta otomatis terhadap lingkungan alam (Kartono, 1999). Karenanya pendidikan berlangsung lebih bersifat kondisional dan cultural.

Melalui pendidikan anak didik dikondisikan sedemikian rupa untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan sikap, kebiasaan serta pola tingkah laku yang diharapkan. Dengan kata lain, melalui proses pendidikan anak didik dibimbing dan diarahkan dalam mencari dan menemukan ilmu pengetahuan dan nilai sosio-budaya lingkungannya yang kemudian menjadi kebudayaan pada jamannya.

Belajar dalam konteks ini kemudia dipahami sebagai suatu proses pencarian dan penemuan secara terus-menerus dengan menjadikan alam dan lingkungan sekitar sebagai

objek. Oleh karenanya anak di didik sekaligus dituntut untuk selalu aktif, kreatif serta menjadi inovator untuk menemukan hal-hal baru.

Dalam pendidikan, oleh karenanya harus mempertimbangkan serta memahami tingkah laku anak, tata cara hidup, adat istiadat, keyakinan, kebutuhan serta harapan anak didik serta orang tua atau masyarakatnya agar anak didik tidak tercerabut dari kebudayaan dan lingkungannya sendiri. Dengan demikian anak didik dapat menghayati kebudayaan zamannya sebagai pemilik pribadi dan menjadikan sebagai cara hidup sehari-hari.

Pemahaman pendidikan dari aspek kebudayaan seperti diuraikan sebelumnya, maka lingkungan dan kebudayaan setempat merupakan faktor pembentuk bagi kepribadian anak. Jadi anak didik terus berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan serta budaya lokal setempat.

Pendidikan selalu berlangsung dalam satu lingkungan budaya tertentu. Dalam upaya membangun wujud anak manusia, pendidikan akan terus-menerus mengalami perubahan sejalan dengan pengkondisian sosial budaya wilayahnya, yang sangat dipengaruhi oleh faktor waktu dan modernisasi sebagai intervensi akal dan tangan-tangan terampil manusia terhadap alam sekitar.

Pendidikan dari segi budaya dengan demikian dipahami sebagai penggalian serta penemuan kembali nilai-nilai budaya dalam konteks dan kondisi generasi yang sedang berlangsung.

### 2.2.2. Aspek Politik

Pendidikan dilihat dari aspek politik merupakan sarana bagi proses penyadaran, pemecahan masalah serta proses dialogis (Freire, 2000). Hal ini oleh Kartono disebut sebagai pendidikan sejati (Kartono, 1997).

Pendidikan merupakan suatu proses penyadaran. Karena melalui pendidikan yang baik akan dapat menyadarkan anak didik dari siapa dirinya, orang lain maupun lingkungannya. Dengan demikian peserta didik akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan dirinya. Mereka dapat menjadi dirinya, bukan menjadi orang lain, disamping mengetahui dan memahami orang lain. Proses penyadaran seperti itu akan dapat menumbuhkan kembangkan adanya toleransi, saling mengetahui, saling memahami dan akhirnya saling menghargai satu sama lain. Semua itu merupakan modal utama bagi terjalannya hubungan harmonis antara sesama, manusia dengan lingkungannya maupun manusia dengan Tuhan-nya.

Pendidikan sebagai proses pembentukan insane pemecah masalah yang handal. Melalui pendidikan anak didik selalu diajak befikir secara kritis untuk melihat kembali kedudukan pribadinya beserta lingkungan hidupnya. Jika dalam proses tersebut ada ketidakcocokan, tidak sesuai, untuk kemudia mereka mempermasalahkannya, sekaligus juga mau dan mampu melakukan perbaikan terhadap semua permasalahan yang ada. Dengan membiasakan anak untuk berpikir kritis, maka mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang kreatif, aktif, serta inovatif. Bukan sebagai manusia yang pasif, manusia yang bisanya hanya menunggu perintah, mengekor serta menjadi seperti robot.

Pendidikan dialogis maksudnya bahwa peserta didik ditumbuhkan kesadaran dan kemampuannya untuk selalu melakukan dialog. Karena semua wujud di dunia ini masih bisa dirundingkan dengan orang lain.

### 2.2.3. Aspek Ekonomi

Dari aspek ekonomi pendidikan merupakan investasi manusiawi dan investasi ekonomis. Sebagai investasi manusiawi yakni melalui pendidikan anak didik diberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan agar mereka sanggup memasuki pasaran kerja dan dunia usaha. Oleh karena kemudian ada kecenderungan orang memberikan penilaian terhadap sistem pendidikan dengan melihat produktifitas dan efektivitas lulusannya. Semakin produktif lulusannya serta semakin banyak output yang dapat diterima dunia kerja, maka semakin baiklah suatu sistem pendidikan tersebut. Demikian sebaliknya, semakin banyak lulusan yang menjadi pengangguran maka sistem pendidikan tersebut dikatakan kurang baik.

Pendidikan dikatakan sebagai investasi ekonomis, karena perkembangan sektor ekonomi sangat bergantung besarnya kuantitas dan tingginya kualitas tenaga terdidik. Dengan semakin banyaknya tenaga yang terdidik yang berkualitas tinggi seperti : wirausahawan, manajer maupun tenaga administrasi yang terlatih serta angkatan kerja yang terampil, akan dapat meningkatkan sektor ekonomi suatu bangsa dengan cepat.

Dengan demikian suatu pendidikan sekolah hendaknya lebih banyak menekankan pada pendidikan moral ekonomis dan pendidikan sosial ekonomis untuk membangun manusia ekonomis yang produktif, yang bisa menghargai pekerjaan/karya, memiliki etik

kerja tinggi dapat diterima di pasaran kerja serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika bisnis demi terciptanya masyarakat adil dan sejahtera.

Secara mikro pendidikan dipandang sebagai proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas (sekolah). Oleh karenanya unsure-unsur yang terlibat di dalam pendidikan tersebut adalah : pendidik, anak didik, dan dunia sebagai realitas (Freire, 2000). Implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana hubungan antara ketiga unsur pendidikan tersebut sangat bergantung kepada sistem pendidikan yang dianut. Dan bagaimana sistem pendidikan yang digunakan sangat ditentukan oleh tujuan pendidikan nasional yang diinginkan untuk dicapai.

Di negara demokrasi, sistem pendidikan bersifat lebih terbuka. Setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagai negara demokrasi yang mengakui nilai dan martabat pribadi manusia, maka pendidikan dipergunakan sebagai wahana untuk membentuk warga negaranya menjadi pribadi dirinya sendiri. Pendidikan bukanlah dijadikan sebagai instrumen bagi kepentingan pemerintah maupun negara, tetapi untuk membudayakan anak manusia. Individu diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin. Rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah atau negara lebih bersifat memfasilitasi semua kebutuhan warganya tanpa terkecuali. Rakyat lebih banyak dilibatkan dalam penentuan kebijakan pendidikan, sehingga-sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan warganya.

Di negara totaliter dengan pemerintah yang memiliki kekuasaan mutlak, prakter pendidikannya berbanding terbalik dengan yang ada di negara demokrasi. Pendidikan di

negara totaliter menjadi alat pemerintah. Individu tidak punya kebebasan menjadi dirinya sendiri, namun dibentuk dan digiring untuk menjadi alat kepentingan penguasa. Oleh karenanya tujuan pendidikannya adalah membentuk manusia-manusia yang patuh sehingga menjadi warga negara yang mengabdikan dirinya secara total, memiliki konformitas total, dan kolektivisme total. Pengakuan terhadap individualitas, beserta dengan perbedaan dan penentuan manusia sebagai sama sekali pribadi tidak ada. Semua diabdikan untuk kepentingan negara dan pemerintah. Pemerintah dan negara adalah diatas segala-galanya. Pendidikan demikian akan lebih bersifat *drilling*, paksaan, penekanan, penggiringan dan pengindoktrinasian (Kartono, 1997).

Dalam praktek negara-negara seringkali pendidikan dipakai sebagai alat politik untuk mempertahankan *status quo* rezim yang berkuasa. Di balik pendidikan yang berlaku secara legal, telah dilakukan sedemikian rupa sehingga yang nampak dipermukaan dari kebijakan pendidikan tersebut adalah demi kepentingan rakyat banyak. Namun di balik semua itu sebenarnya hanyalah kepentingan pihak penguasa. Kepentingan warga seluruhnya hanyalah tameng sebagai tempat untuk berlindung bagi kepentingan pihak penguasa.

Pendidikan secara formal ditetapkan, yang konon diperuntukan untuk seluruh rakyat, namun kenyataannya hanya dapat dinikmati oleh golongan penguasa dan atau golongan berduit. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari mahalnya biaya pendidikan yang ada, yang memang telah menjadi scenario dari pembuat kebijakan (Freire, 2000) untuk dapat dipakai sebagai alat untuk mendominasi kelompok lain.

Pendidikan yang hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil warga ini memang tujuan utamanya adalah mengharapkan peserta didik mampu menguasai ilmu

pengetahuan dan ketrampilan yang tidak dimiliki oleh mayoritas warga yang lainnya. Dengan demikian warga yang terdidik tersebut dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta pengalamannya kemudian dapat mendominasi kelompok mayoritas kelas bawah.

Pendidikan yang hanya sedikit memberikan kebebasan pada masyarakat kelas bawah atau kelas pekerja ini tidak melakukan pengembangan pada pemberdayaan sumber daya manusia. Namun mereka dijejali ilmu pengetahuan yang disusun secara selektif dengan memasukkan kepentingan tertentu dan membuang yang lainnya. Sekolah sebagai tempat pelaksanaan pendidikan tersebut tidak lebih hanya melakukan transformasi dan pembentukan budaya dengan cara menggunakan bahasa, membentuk cara berfikir, menciptakan hubungan sosial, bentuk budaya dan pengalaman tertentu (Freire, 2000). Peserta didik diberikan setumpuk pengetahuan dan diajarkan berbagai ketrampilan, tetapi tidak mengetahui untuk apa, kapan dan dimana semua itu dipergunakan. Sistem pendidikan yang ada telah menciptakan manusia-manusia robot yang selalu menghambakan diri pada canda dan keinginan orang lain. Menjadi alat bagi orang lain, bukan manusia yang dinamis, kreatif dan inovatif.

Sistem pendidikan yang menggunakan sistem bank (Freire, 2000) dengan menabung sejumlah ilmu pengetahuan dan ketrampilan pada anak (dianggap sebagai bank), dengan harapan suatu saat dapat memetik hasil yang berlipat ganda, akan menciptakan pribadi-pribadi yang pintar tapi bodoh, manusia-manusia yang terampil tapi tidak bisa apa-apa. Manusia seperti oleh Kartono (1997) menyebutnya sebagai pribadi tanpa wajah dan pribadi tanpa negara.

## **2.3. JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN**

### **2.3.1. Jalur Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang, terprogram, terencana dan berkesinambungan, seperti : pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus dan satuan lain yang sejenis.

Dalam penelitian ini difokuskan pada jalur pendidikan yang diselenggarakan di sekolah (pendidikan formal).

### **2.3.2. Jenis Pendidikan**

Jenis pendidikan yang termasuk dalam jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan professional.

Pendidikan umum adalah jenis pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.

Pendidikan kejuruan merupakan jenis pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan ini diselenggarakan pada tingkat atau jenjang sekolah menengah atas (SMTA) seperti : Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan sebagainya.

Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

Pendidikan kedinasan adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan dalam mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.

Pendidikan professional adalah jenis pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan pada penerapan keahlian tertentu.

### 2.3.3. Jenjang Pendidikan

Jenis pendidikan yang termasuk pada jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

#### 2.3.3.1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan selama 9 (sembilan) tahun yakni 6 (enam) tahun di sekolah dasar (SD) dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama (SMP).

Adapun tujuan diselenggarakannya pendidikan dasar itu antara lain :

- a) Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada peserta didik
- b) Mengembangkan serta membentuk sikap peserta didik

c) Membekali ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup di masyarakat

Apabila tujuan pendidikan dasar tersebut diatas diklasifikasikan berdasarkan lulusan yang akan dibentuk, dapat dikelompokkan menjadi dua yakni : pertama, menyiapkan peserta didik agar setelah mereka lulus mereka mempunyai kemampuan dasar sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah, dan kedua, menyiapkan peserta didik yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dengan berbagai kemampuan dan ketrampilan sehingga mereka dapat diterima untuk memasuki dunia kerja yang ada di masyarakat.

#### 2.3.3.2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Sama halnya dengan pendidikan dasar, pendidikan menengah juga diselenggarakan guna menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, sikap serta keterampilan yang dibutuhkan oleh jenjang pendidikan tinggi dan yang dibutuhkan pasaran kerja.

Bagi lulusan yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi diharapkan dapat langsung memasuki dunia kerja karena pada pendidikan menengah mereka sudah dibekali keterampilan tertentu sesuai dengan jenis pendidikan yang diikuti.

Sedangkan bagi mereka yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, kiranya mereka dapat melakukan hal tersebut mengingat untuk itu peserta didik telah dibekali pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan yang diprasyaratkan untuk memasuki pendidikan tinggi.

#### 2.3.3.3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan lanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan dengan tujuan : (a) untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, (b) mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang memperkaya kebudayaan nasional.

Dilihat dari segi tujuan institusional yang ada, pada umumnya pendidikan tinggi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yakni : (a) pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan tujuan agar lulusannya menjadi pengembang ilmu pengetahuan tertentu atau sebagaia "*scienceties*" seperti : Lembaga Universitas, dan (b) pendidikan tinggi yang diadakan dengan tujuan untuk mencetak peserta didik menjadi orang profesional atau ahli dalam bidang kerja tertentu seperti : Lembaga Institut.

### 3. Anak Jalanan

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial RI (2001) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk

mencari nafkah atau berkeliaran ditempat atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu, dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2001), indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 dan 18 tahun.

Anak jalanan merupakan bagian dari pekerjaan yang mendapatkan “tahta” paling rendah dari bentuk-bentuk pekerjaan. Anak jalanan masuk dalam kategori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Sebagai bagian dari pekerjaan anak (*child labour*), anak jalanan bukanlah kelompok yang homogen. Anak jalanan cukup beragam dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungan dengan orang tua atau orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatan dijalanan, serta jenis kelaminnya. Secara garis besar terbagi atas tiga kategori, (UNICEF, dalam Hatloy dan Huser, 2005) yaitu :

a) *Children on the street*, yaitu anak-anak yang memiliki kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban dan tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu :

1. Anak-anak jalanan yang masih tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang kerumah setiap hari,
2. Anak-anak jalanan yang tinggal di jalanan tetapi masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang ke rumah secara berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.

## **METODE PENELITIAN**

b) *Children of the street*, yaitu anak-anak jalanan yang menghabiskan seluruh atau sebagian waktunya di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi dan memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya. Ada beberapa diantara mereka yang masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya atau keluarganya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena sebab, biasanya kekerasan, sehingga lari atau pergi dari rumah. Anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap pelakuan salah, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seks.

c) *Children in the street families*, yaitu anak yang berkeluarganya memang di jalanan yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggal di jalanan.

Menurut UNDP dan Depsos RI dalam penelitian terhadap anak jalanan dan keluarganya di Jakarta dan Surabaya, anak jalanan dibagi menjadi 4 (empat) kategori (Depsos, 1997) :

a) *Anak jalanan yang hidup di jalanan*, memiliki karakteristik :

1. Telah putus hubungan dengan orang tuanya atau lama tidak bertemu dengan orang tua minimal 1 tahun sekali
2. Berada di jalanan seharian dan meluangkan waktu 8-10 jam untuk bekerja serta sisanya untuk mengelandang/tidur

3. Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper toko, kolong jembatan, terminal, stasiun, dan lain-lain.
4. Telah putus sekolah
5. Pekerjaan pada umumnya adalah mengamen, mengemis, memulung sampah, dan serabutan (melakukan apa saja) yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6. Rata-rata berusia dibawah 14 tahun.

b) *Anak jalanan yang bekerja di jalanan*, memiliki karakteristik :

1. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang ke rumah secara paradik, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, atau tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan.
2. Berada di jalanan sekitar 8-10 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam
3. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak bersama teman, mengontrak sendiri, mengikuti saudara/orang tua, atau di tempat kerjanya di jalanan. Tempat tinggal mereka umumnya di lingkungan kumuh yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari daerah yang sama.
4. Tidak bersekolah lagi
5. Pekerjaan mereka umumnya adalah penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung sampah, penyemir sepatu, dan lain-lain. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan orang tuanya.
6. Rata-rata berumur dibawah 16 tahun.

c) *Anak yang rentan menjadi anak jalanan*, memiliki karakteristik :

1. Berhubungan teratur dengan orang tuanya, yakni setiap hari bertemu
2. Berada di jalanan sekitar 4-6 jam untuk bekerja
3. Tinggal dan tidur bersama orang tua
4. Masih bersekolah
5. Pekerjaan mereka pada umumnya adalah menjual koran, menjual makanan, alat tulis, plastic untuk bawaan barang, menyemir sepatu, mengamen, dan lain-lain. Untuk memenuhi kehidupan sendiri dan orang tuanya.
6. Usia rata-rata dibawah 16 tahun.

d) *Anak jalanan yang berusia diatas 16 tahun*, memiliki karakteristik :

1. Terdiri dari anak yang sudah putus hubungan dan yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
2. Berada di jalanan 8-24 jam, kadang-kadang hanya beberapa jam, kadang-kadang seharian di jalanan
3. Tempat tinggal dan tidur mereka kadang kala di rumah orang tuanya, kadang kala di jalanan
4. Mereka telah tamat SD atau SMP, namun sudah tidak bersekolah lagi
5. Pekerjaan mereka biasanya tidak tetap, apa saja, seperti calo, mancuci bus, menyemir sepatu dan lain-lain. Hasilnya digunakan untuk diri sendiri atau memenuhi kebutuhan orang tuanya. Kebutuhan mereka adalah pekerjaan tetap.
6. Rata-rata berusia diatas 16 tahun

Berdasarkan beberapa pendapat hasil penelitian tentang klasifikasi anak jalanan seperti diatas, penulis pada pengelompokan berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh UNICEF karena sudah mencakup keseluruhan kategori anak jalanan yang diklasifikasikan oleh peneliti lain.

### **3.1. TAHAPAN MUNCULNYA ANAK JALANAN**

Sukardi (1999) menyatakan bahwa tahapan munculnya anak jalanan dibagi menjadi beberapa tahapan yakni :

*Tahap I* : Pengetahuan sampai adanya ketertarikan

Ada kebiasaan semakin berkempok dari anak-anak di perkampungan. Mereka ini biasanya bersama kelompoknya jalan-jalan ketempat sebagaimana yang telah disepakati bersama. Diperjalanan mereka menjumpai anak-anak jalanan sedang bekerja. Sampai di sini masih sebatas melihat dan sebagai pengetahuan mereka, bahwa ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dan itu bisa dilakukan oleh anak seusia mereka. Pada tahap ini masih tergantung pada masing-masing anak, seberapa besar ketertarikan dan perhatian mereka kepada pekerjaan tersebut. Namun dalam tahap ini tidak membuat anak turun ke jalan, melainkan bergantung pada stimulasi berikutnya (adanya fasilitas).

*Tahap II* : Ketertarikan sampai keinginan

Bagian ini merupakan tahap ketertarikan yang telah mendapat “fasilitas” atau faktor pendorong, seperti kondisi ekonomi atau kondisi keretakan hubungan keluarga. Fasilitas tersebut, akan semakin memperkuat keinginan anak untuk turun ke jalanan.

### *Tahap III : Pelaksanaan*

Anak mulai merasakan niatan dengan mendatangi tempat operasi. Bila disini mereka menemukan teman yang sudah dikenal maka keinginan segera terealisasi meski agak malu-malu.

### *Tahap IV : Mulai memasuki kehidupan anak jalanan*

Dalam tahap ini anak akan diterpa berbagai pengaruh kehidupan jalanan. Namun demikian hal ini juga tergantung pada diri anak itu sendiri dan teman yang membawanya. Dan juga tidak kalah penting adalah peran orang tua untuk tetap mengontrolnya. Bila ketiga pihak diatas masih berada di jalanan, anak akan tetap positif dan tidak akan memcabut keputusannya untuk tetap di jalanan.

### *Tahap V : Terjerumusny atau kembali pada kehidupan wajar*

Bila dalam perkembangannya anak merasa bahwa mencari nafkah di jalanan semakin sulit maka ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama bertahan dengan tetap memegang norma kemasyarakatan atau keluar dari komunitas jalanan. Kemungkinan kedua, bila menerima stimulus yang baik dari kawan maupun pihak lain untuk berbuat negatif, maka si anak sudah masuk kategori anak jalanan bebas, norma agama dan kemasyarakatan cenderung di tinggalkan. Pada tahap inilah kecenderungan berperilaku menyimpang terjadi seperti, judi, seks bebas, atau tindakan kriminal lainnya.

## **3.2. FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA ANAK JALANAN**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Semarang (2008) mengungkapkan bahwa faktor dominan munculnya anak jalanan adalah karena kemiskinan yaitu

sebesar 83,33 %, dilanjutkan dengan keretakan dalam keluarga sebesar 1,96 %, orang tua yang tidak paham dan tidak memenuhi kebutuhan sosial anak sebesar 0,98 %, dan faktor lainnya (keinginan sendiri, kekerasan oleh orang tua, dan ingin bebas) sebesar 13,7 %. Melihat hal tersebut kemiskinan merupakan hal yang paling rentan menyebabkan anak turun ke jalan.

Turan (2000) menyebutkan ada 3 (tiga) alasan anak turun ke jalan yaitu, pertama, karena menopang ekonomi keluarga, kedua, mencari kompensasi dari kurangnya perhatian keluarga, dan ketiga, hanya sekedar mencari uang tambahan. Hal yang lain diungkapkan Soeparman (2000) menyatakan penyebab anak turun dan bekerja di jalan yaitu karena ada disfungsi keluarga, karena adanya penolakan dari masyarakat, keengganan anak pulang ke rumah karena lebih senang di jalanan, peluang pekerjaan sektor informal terus meningkat yang juga melibatkan partisipasi anak dan yang terakhir ada keberanian dari anak untuk hidup di jalan. Nwamba (2006) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor yang paling dominan yang menyebabkan anak turun ke jalan adalah *economic hardship in country* ( 98 % ), *runaway house help* ( 85 % ), dan *lack of parental care and love* ( 75 % ).

Dari penjelasan yang dikemukakan menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan faktor dominan penyebab anak menjadi anak jalanan. Namun data dari beberapa literatur menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah satu-satunya alasan anak turun ke jalanan. Secara umum ada tiga tingkatan penyebab anak turun ke jalan (Sudrajat, 1996) :

1. Tingkat Mikro (*Immediate causes*), yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga
2. Tingkat meso (*underliving causes*), yaitu faktor yang ada pada masyarakat
3. Tingkat Makro (*basic causes*), yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro.

Pada tingkatan mikro sebab yang bisa diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga bisa berdiri sendiri, yakni :

1. Karena disuruh bekerja, bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus sekolah, berpetualangan, ingin merasakan kebebasan dan ada ajakan dari teman sepermainan. Persoalan tersebut merefleksikan kondisi pribadi anak yang bermasalah sehingga menyebabkan anak menjadi anak jalanan.
2. Berasal dari keluarga yang terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan yang dialami di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga atau tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak mengalami masalah fisik, psikis, dan sosial.

Dalam tingkatan mikro Solahudin (2004) juga menambahkan bahwa penyebab munculnya anak jalanan, yaitu :

1. Keluarga Miskin

Hampir seluruh anak jalanan berasal dari keluarga miskin. Sebagian besar dari mereka yang berasal dari perkampungan urban yang tidak jarang menduduki lahan-lahan milik negara dengan membangun rumah-rumah petak yang sempit yang sewaktu-waktu dapat digusur. Anak jalanan yang berasal dari luar kota, sebagian besar berasal dari desa-desa miskin. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mendorong anak-anak menjadi anak jalanan. Anak dari keluarga miskin, karena kondisi kemiskinan kerap kali kurang terlindungi sehingga menghadapi resiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan.

2. Perceraian dan kehilangan orang tua

Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor resiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalanan. Perceraian atau perpisahan orang tua yang kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan pernikahan sering kali membuat anak menjadi frustrasi. Rasa frustrasi ini akan semakin bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang tua mereka atau tatkala anak biasanya lebih memilih tinggal bersama ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian, justru mendapatkan perlakuan buruk dari ayah tiri atau pacar ibunya.

### 3. Kekerasan keluarga

Kekerasan keluarga merupakan faktor resiko yang paling banyak dihadapi oleh anak-anak sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup di jalanan. Berbagai faktor resiko lainnya berkaitan dengan hubungan antara anak dengan keluarganya, tidak terlepas dari persoalan kekerasan. Seperti kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dipaksa menyerahkan sejumlah uang tertentu setiap harinya, akan menghadapi resiko menjadi korban kekerasan apabila tidak memenuhi target tersebut. Kekerasan dalam keluarga tidak hanya bersifat fisik saja, melainkan juga bersifat mental dan seksual.

### 4. Keterbatasan ruang dalam rumah

Keterbatasan ruang dalam rumah bisa menimbulkan resiko anak-anak turun ke jalan. Biasa ini dialami oleh anak-anak yang berada di beberapa perkampungan urban yang menduduki lahan milik negara. Banyak dijumpai adanya rumah-rumah petak yang didirikan secara tidak permanen dan sering kali menggunakan barang-barang bekas seandainya dengan ruangan yang sempit, kadang hanya berukuran 3 x 4 meter saja. Dengan bentuk dan bangunan yang tidak layak disebut rumah itu, kenyataannya dihuni

oleh banyak orang. Misalkan saja sebuah keluarga, termasuk hubungan suami istri berlangsung dalam ruangan yang terbatas itu, tentunya itu akan berpengaruh buruk terhadap anak-anak, biasanya yang berumur lebih dari 5 tahun memilih atau dibiarkan oleh orang tuanya untuk tidur diluar rumah, seperti di tempat ibadah (mushola atau masjid) yang ada dikampung tersebut, pos ronda, atau ruang-ruang publik yang berdekatan dengan kampung mereka.

#### 5. Eksploitasi ekonomi

Anak-anak yang turun ke jalan karena di dorong oleh orang tua atau keluarganya sendiri atau biasanya bersifat eksploitatif. Anak ditempatkan sebagai sosok yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Eksploitasi ekonomi oleh orang tua mulai marak terjadi ketika pada masa kritis, dimana anak-anak masih aktif bersekolah didorong oleh orang tuanya mencari uang dan ditargetkan memberikan sejumlah uang yang ditentukan oleh orang tua mereka.

Pada tingkat meso (masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi meliputi :

1. Pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga semakin cepat anak memasuki dunia kerja maka semakin cepat ia memberikan bantuan pada keluarganya. Anak-anak yang diajarkan bekerja sehingga menyebabkan anak dikeluarkan dari sekolah dan memilih terus bekerja di jalan.
2. Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan sehingga anak-anak mengikuti kebiasaan tersebut. Kelompok kaum kumuh di perkotaan biasanya membawa anak-anaknya ikut serta, mereka mengasong, menyemir, mengemis dan lain-lain.

Pada tingkat mikro, sebab yang dapat diidentifikasi meliputi :

1. Ekonomi

Kondisi ekonomi di Indonesia negara sangat berdampak pada pertumbuhan anak jalanan. Kesenjangan ekonomi sangat terlihat di banyak kota besar di Indonesia. Kesenjangan ini menimbulkan banyak bermunculan pekerjaan-pekerjaan di sektor informal. Peluang untuk bekerja di sektor informal ini menyebabkan anak-anak dengan mudah mengaksesnya tanpa modal dan keterampilan maupun pendidikan. Ketimpangan antara kota dan desa menyebabkan urbanisasi besar-besaran yang pada akhirnya berimbas pada munculnya anak jalanan.

Masalah ini tidak secara langsung menyebabkan anak menjadi anak jalanan, namun masalah ekonomi selalu menjadi alasan populer di kalangan anak jalanan untuk turun ke jalanan. Menurut laporan penelitian yang dilakukan Kusumasari dkk (2014) sebagian besar kemunculan anak jalanan dipengaruhi oleh masalah ekonomi. Hal ini tentu menjadi masalah yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan problematika anak jalanan di Indonesia.

## 2. Pendidikan tidak terjangkau

Banyak masalah yang dihadapi anak jalanan ketika berurusan dengan sekolah. Karena memiliki latar belakang orang tua yang berprestasi sebagai pekerja di sektor informal seperti pengemis, pemulung, pedagang asongan dan lain-lan, berhadapan dengan berbagai stigma negatif baik itu dari guru di sekolah maupun teman sepermainan di sekolah sehingga anak menjadi tidak dapat menerima berbagai tekanan tersebut akhirnya memutuskan untuk keluar dari sekolah dan menjadi pengemis, pengamen dan lain-lain.

## 4. Rumah Singgah

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran serta masyarakat, baik melalui lembaga pelayanan dan perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, dan lembaga pendidikan, dengan program-program yang mendukung dan sesuai dengan kebutuhan anak, seperti memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif. Dari kondisi tersebut, diperlukan suatu tempat atau lembaga untuk menampung dan memberikan pemenuhan kebutuhan pendidikan. Dalam khasanah penanganan anak jalanan dikenal tiga pendekatan, yakni street based (berpusat di jalanan), centre based (berpusat di panti), dan community based (berpusat di masyarakat). Setiap pendekatan tersebut mempunyai ciri khas dari segi pelayanan, strategi, dan sasaran programnya. Pendekatan rumah singgah ini mulai berkembang akhir-akhir ini di berbagai Negara untuk melengkapi pendekatan yang sudah ada. Keunikannya adalah mampu digunakan untuk memperkuat tiga pendekatan diatas. Jika ditempatkan di wilayah yang dekat banyak anak jalanan, dapat dipandang sebagai street based yang menjadi pusat kegiatan anak jalanan. Jika ditempatkan di suatu wilayah dimana banyak anak warga tersebut menjadi anak jalanan, dapat dipandang sebagai pusat kegiatan pula atau pintu masuk untuk menangani anak jalanan dengan melibatkan warga masyarakat. Rumah Singgah pada umumnya berupa rumah yang dikontrak juga dipandang sebagai panti (center) baik untuk berlindung maupun sebagai pusat kegiatan. Rumah Singgah merupakan Lembaga Sosial Masyarakat (LSK) memberikan solusi alternatif dengan memberikan pelayanan sosial kepada anakanak yang kurang beruntung. Dimana bagi mereka disediakan rumah penampungan dan pendidikan yang berfungsi sebagai tempat bernaung dan media pendidikan non formal yang dapat membawa perubahan bagi anak jalanan. selain itu mempertahankan kemampuan anak dimana penanganannya

berdasarkan aspirasi dan potensi yang dimiliki anak. Para pekerja sosial dalam bekerja lebih banyak berprinsip perkawanan dalam pendampingan yang sejajar sebagai seorang sahabat. Penyediaan rumah singgah merupakan upaya agar hak-hak anak dari para anak jalanan dapat terpenuhi, hal mana akan mendorong kelancaran proses tumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat ikut serta dalam pembangunan nasional dengan melaksanakan peran dan tugas sebagai anak

## F. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual merupakan definisi dari konsep-konsep yang dipakai dan menjadi pokok perhatian pada penelitian, yang dimaksud sebagai gambaran, guna menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian konsep-konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian dan untuk mengetahui batasan tentang istilah yang ada dalam pokok bahasan. Adapun batas bahasan pengertian konseptual dalam penelitian ini adalah :

### 1. Persepsi

Suharnan (2005), persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia.

### 2. Pendidikan Formal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperjelas dengan pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pendidikan Formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

### 3. Anak Jalanan

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial RI (2001) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran ditempat atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun.

### 4. Rumah Singgah

Rumah Singgah merupakan Lembaga Sosial Masyarakat (LSK) memberikan solusi alternatif dengan memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak yang kurang beruntung. Dimana bagi mereka disediakan rumah penampungan dan pendidikan yang berfungsi sebagai tempat bernaung dan media pendidikan non formal yang dapat membawa perubahan bagi anak jalanan. selain itu mempertahankan kemampuan anak dimana penanganannya berdasarkan aspirasi dan potensi yang dimiliki anak. Para pekerja sosial dalam bekerja lebih banyak berprinsip perkawanan dalam pendampingan yang sejajar sebagai seorang sahabat.

## G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan suatu usaha untuk menjelaskan sesuatu konsep yang masih berbentuk konstruk menjadi kata-kata yang bisa menggambarkan bentuk dan perilaku dari fokus penelitian yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain.

Indikator persepsi anak jalanan mengenai pentingnya pendidikan formal, yaitu :

1. Pengenalan indera
2. Pengenalan pola

3. Perhatian
4. Pengaruh lingkungan

## H. METODE PENELITIAN

### 1. JENIS PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan kualitatif, hal ini didasarkan pada rumusan-rumusan yang muncul dalam penelitian ini yang menuntut peneliti untuk melakukan berbagai aktivitas eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah-masalah yang menjadi fokus masalah penelitian ini. Kemudian pengumpulan berbagai data dan informasi akan dilakukan melalui wawancara, dan dokumen mengenai sumber-sumber data yang diperlukan. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur dasar penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bodgan & Taylor, 2002).

Penelitian kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek amatan secara rinci (Suyanto, 2011). Metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Natzir, 1998).

Jadi, penelitian kualitatif - deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan suatu obyek, kondisi, sistem pemikiran secara akurat yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati pada masa sekarang.

## 2. LOKASI PENELITIAN

Rumah Singgah Mandiri yang berlokasi di jalan Perintis Kemerdekaan, No 33B Kerebokan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta

## 3. JENIS PENELITIAN

### a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Rahmawati, 2011). Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan. Misalnya, tim relawan, tim selector, serta orang-orang yang terlibat di dalam gerakan ini.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

### a. Wawancara

Wawancara yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu anak-anak jalanan dan relawan di Rumah Singgah Mandiri. Hasil wawancara diharapkan dapat memberikan informasi berdasarkan topik penelitian ini mengenai persepsi anak jalanan terhadap pendidikan formal.

b. Dokumentasi

Dalam teknik ini, peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber data yang berasal dari berbagai sumber, diantaranya adalah buku-buku, arsip-arsip, agenda, catatan-catatan maupun melalui media online lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung dilapangan terkait dengan fenomena yang akan diteliti.

Tabel Kebutuhan Data

No	Kebutuhan Data	Metode	Sumber Data
1	Data Statistik Anak Jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri	Dokumen	Arsip dari Rumah Singgah Anak Jalanan
2	Persepsi	Wawancara	1. Anak jalanan binaan Rumah Singgah Anak Mandiri sebanyak 3 orang

			2. Relawan/pendamping sebanyak orang
--	--	--	---

## 5. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data merupakan proses penafsiran hasil penelitian, penafsirannya meliputi perbandingan antara apa yang diprediksi di awal penelitian dan hasil yang diperoleh sesudah penelitian. Dalam proses penafsiran data biasanya berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, peneliti menafsirkan teks yang disampaikan oleh partisipan. Kedua, peneliti menyusun kembali hasil penelitian tingkat pertama dan mendapatkan tema-temanya. Ketiga, menghubungkan tema-tema tersebut sehingga membentuk teori, gagasan dan pemikiran baru. (Raco, 2010).

Berdasarkan uraian di atas maka teknik analisis data pada penelitian ini melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dihasilkan dari proses studi pustaka, interview (wawancara) dan observasi.

### b. Penilaian Data

Data yang telah didapatkan kemudian dikaji dan dinilai untuk mendalami dan mengetahui keabsahan dan kesesuaian dari data primer dan data skunder.

### c. Interpretasi Data

Data yang sudah dikaji dan dinilai kemudian diinterpretasikan lewat reduksi pada penelitian ini yang disesuaikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan penelitian.

### d. Generalisasi

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan cara menghubungkan hasil penelitian yang dihasilkan dari proses penelitian, bertolak dari fenomena yang terjadi dilapangan menuju kesimpulan umum. Dengan harapan dapat menambah wawasan secara teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian.